

SKRIPSI
PRAKTIK PERJANJIAN KREDIT SEWA BELI ARMADA
TAKSI PADA KOPERASI SOPIR TRANSPORTASI SOLO
(KOSTI SOLO)



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
Guna mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

ARIANI PUTRI INDARSARI

C 100 060 005

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan transportasi darat khususnya transportasi perkotaan merupakan bagian pembangunan dalam menjawab pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat seperti kota Solo. Dimana kota Solo sebagai kota budaya dan pariwisata diupayakan penyediaan pelayanan yang baik dalam bidang jasa angkutan umum, salah satunya kendaraan taksi. Sistem transportasi nasional ditata dan terus disempurnakan dengan didukung peningkatan sumber daya manusia sehingga terwujud pelayanan yang baik, serta disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijaksanaan tata ruang dan pelestarian lingkungan.

Maka peran serta pihak swasta dan koperasi dalam penyelenggaraan transportasi perlu didorong dan digalakkan melalui penciptaan iklim yang menumbuhkan kompetensi yang sehat dan saling menghidupi. Dimana jasa transportasi sangat penting bagi pertumbuhan pembangunan Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang. Dan pembangunan itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan rakyat mempunyai peranan penting didalamnya untuk ikut berpartisipasi guna

menunjang cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Dalam pelita ke-4 ini arah kebijaksanaan pembangunan diprioritaskan dibidang ekonomi termasuk juga dalam hal transportasi serta sarana prasarana. Lebih lanjut didalam penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 Ditegaskan bahwa: perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.¹ Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah transportasi, yang terlebih menyediakan layanan kredit ataupun sewa beli terhadap armada yang digunakan. Dimana dalam percakapan sehari-hari masyarakat baik pedagang, petani atau pegawai, istilah sewa beli sekarang ini bukan merupakan hal yang asing lagi. Ini menandakan bahwa istilah itu dikenal jauh melanda kehidupan ekonomi maupun pedalaman,

Didalam pembangunan ini demi tercapainya tujuan negara, maka pembangunan ekonomi yang paling diutamakan. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan adanya Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya beradasrkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²

Hal ini sesuai dengan pola umum sasaran bidang pembangunan jangka panjang ke-2. Dalam sasaran di bidang ekonomi terciptanya perekonomian

¹ Penjelasan pasal: 33 ayat: 1 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

² Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000, hal 4

yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang mantap, bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat.

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi perlu diingat pasal 33 UUD 1945 Yaitu suatu pasal yang merupakan landasan konstitusional bagi terselenggaranya demokrasi berdasarkan Pancasila yang mengandung sifat gotong-royong dan asas kekeluargaan. Dalam menggalakkan usaha perkoperasian Pihak Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) tidak mau ketinggalan Untuk kantor pelayanan koperasi badan usahanya bernama Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) dibentuk dan dikelola oleh para pegawai kantor KOSTI tersebut untuk kesejahteraan mereka bersama.

Koperasi yang berprinsip mandiri, ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola sendiri.³ Sebagai suatu perusahaan, koperasi harus menjalankan sesuatu usaha yang mendatangkan keuntungan ekonomis, meskipun koperasi bukan merupakan bentuk akumulasi modal.

Mengenai lapangan usaha koperasi Indonesia ini didalam UU No. 25 Tahun 1992 diatur dalam ketentuan pasal 43 dan 44 dan penjelasannya, dari

³ *Ibid*, hal 5

situ ditarik kesimpulan bahwa koperasi dapat bergerak di segala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Oleh karena itu pengelolaan koperasi harus dilaksanakan secara produktif, efektif, dan efisien. Dalam arti koperasi harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan pelayanan usaha, yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota, dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar.⁴

Setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak menjadi anggota koperasi. Tetapi karena koperasi adalah sebuah badan hukum yang akan melakukan tindakan-tindakan hukum, yang benar-benar dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanyalah mereka yang mampu melakukan tindakan hukum atau tindakan koperasi, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi.⁵

Salah satu usaha koperasi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) adalah kredit sewa beli armada taksi serta pelayanan transportasi taksi. Kemudian dengan sistem kredit sewa beli armada taksi koperasi tersebut memberikan hak kepada anggotanya untuk menyewa armada taksinya tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendidik para anggotanya supaya dapat mengkredit armada taksi tersebut dengan sistem sewa beli. Hal ini mengingatkan bahwa kebutuhan uang sangat vital dalam kehidupan kita, baik masyarakat kalangan atas maupun masyarakat kalangan bawah. Dan seakan-akan uang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Disamping itu sewa beli

⁴ Sutanya Rahardja Hadhikusuma, *Op Cit*, hal 103

⁵ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia (cetakan ke 2)*, BEFE-Yogyakarta: Yogyakarta, 2000, hal 8

dapat digunakan untuk peningkatan penghasilan atau upah kerja dimana si pengemudi dapat mengoperasikan armadanya dengan ketentuan-ketentuan khusus. Untuk bisa memberikan kredit dengan sistem sewa beli, maka koperasi yang bekerjasama dengan bank mengenakan bunga yang relative rendah, sehingga tidak memberatkan bagi yang mengambil armada taksi tersebut dengan cara sistem kredit sewa beli.

Pengertian kredit menurut pasal 1 ayat (11) UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:⁶

“Kredit adalah penyediaan barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Adapun kredit yang diberikan mempunyai jangka waktu menengah panjang sesuai dengan yang disepakati / diperjanjikan antara nasabah debitur dengan pihak bank. Bentuk perjanjian adalah merupakan bentuk perjanjian standar.

Prof Subekti SH mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷ Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan perjanjian.

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih terhadap suatu objek tertentu hal ini berarti bahwa kontrak menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Seperti yang

⁶ UU No 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (11) tentang Perbankan

⁷ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta:Bandung, 2009, Hal 74

telah diuraikan diatas maka dalam suatu perjanjian para pihak wajib memperhatikan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, unsur-unsurnya adalah:⁸

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan

Pada dasarnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku kesusilaan dan ketertiban umum. Selain melihat unsur-unsur sahnya perjanjian dibuat adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi bentuk dan objek perjanjian. Namun dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan.

Akan tetapi perlu disadari kadangkala para pihak melakukan negosiasi dalam perjanjian tersebut berada pada kedudukan yang tidak seimbang karena salah satu pihak mempunyai bargaining position yang mana pihak yang kuat mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut yang pada akhirnya melahirkan perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Latar belakang lahirnya perjanjian standar adalah keadaan sosial ekonomi perusahaan yang besar, baik perusahaan pemerintah atau swasta yang mengadakan kerjasama untuk menciptakan kepentingan dengan membuat

⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni: Bandung, 1986, hal 24

syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk digunakan kepada Contract patnernya. Pihak lain biasanya kedudukannya lebih lemah baik dari segi kedudukannya atau ketidaktahuannya sehingga menerima apa yang disodorkan kepadanya.⁹

Banyak cara dan macam yang dapat membuat perjanjian tersebut berakhir misalnya dengan cara membayar harga barang yang dibeli atau dengan jalan mengembalikan barang yang dipinjam. Bisa juga dengan jalan pembebasan hutang dan sebagainya. Adapun cara penghapusan perjanjian telah diatur dalam pasal 1381 BW dalam pasal ini telah disebut satu persatu cara dan jenis penghapusan perjanjian. Namun dari sekian jumlah cara dan jenis penghapusan perjanjian yang disebut dalam pasal tadi, umumnya hanya bercirikan penghapusan perjanjian-perjanjian tertentu.

Sedang cara penghapusan perjanjian pada umumnya hanya disebut dengan satu dua cara saja. Cara penghapusan yang disebut pasal 1381 adalah:¹⁰

1. karena pembayaran (betaling)
2. karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan (konsignasi)
3. karena pembaharuan hutang (novasi, schuld verniewing)
4. karena kompensasi atau perhitungan laba rugi
5. karena konfusi atau percampuran antara hutang dan pinjaman
6. karena pembebasan
7. karena musnahnya barang yang terutang
8. karena daluwarsa atau verjaring
9. Karena pembatalan
10. Karena berlakunya suatu syarat batal

⁹ Mariam Darus Badruzamam, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1993, hal 32

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukun Perdata Pasal 1381

Menurut Mariam Darux Badruzaman, perjanjian kredit lahir dalam bentuk standar karena perbedaan sosial ekonomi kedua belah pihak dan untuk mendorong pelaku usaha ekonomi lemah. Dan kendaraan taksi yang merupakan salah satu transportasi sarana angkutan darat yang memberikan jasa angkutan kepada pemakai jasa (masyarakat) dalam hal mengangkut barang atau orang dengan tujuan memperoleh sejumlah imbalan berupa uang dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Walaupun demikian manusia tidak pernah berhenti menemukan cara-cara baru dalam menjawab segala kebutuhan hidup yang ada atau mungkin ada.

Selain perjanjian kredit terhadap armada terdapat pula suatu perjanjian kerja secara tersendiri yang masih dalam satu kesatuan dengan perjanjian sebelumnya. Perhubungan kerja termasuk persetujuan atau perjanjian pada umumnya. Sebab pada umumnya seseorang yang melakukan prestasi kerja, dia akan memperoleh upah atas hasil kerja tadi sebagai tegenprestasi. Persetujuan kerja pada umumnya dapat dirumuskan sebagai berikut: suatu persetujuan antara pekerja / karyawan / buruh atau penerima kerja atau pemborong kerja sebagai pihak pertama mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada yang menyuruh lakukan kerja atau pemberi borongan sebagai pihak kedua guna mendapat upah selama jangka waktu tertentu.¹¹

Dari rumusan pengertian persetujuan kerja diatas, dapat kita tarik beberapa element yang terkandung didalam persetujuan kerja tersebut:¹²

1. menyerahkan tenaga

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni 1986, hal 245

¹² *Ibid*, hal 245

2. untuk mendapatkan upah dan
3. dalam jangka waktu tertentu

Tidak ada seorang pekerja atau buruh atau pemborong yang bersedia menyerahkan tenaga kerja tanpa mengharapkan upah. Menurut Pasal 1 angka 30 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Besarnya upah dapat mereka sepakati secara tegas akan tetapi bisa juga mengikat secara diam-diam. Upah ialah suatu jumlah wajib yang dibayarkan majikan sesuai tegenprestasi. Pendek kata segala pembayaran yang bukan wajib: bukan upah.

Oleh karena itu pembayaran uang persenan, uang gratifikasi, uang cuti dan sebagainya tidak termasuk upah. Pembayaran yang wajib itulah yang menjadi pokok masalah upah dalam kontrak kerja, tanpa upah tidak ada artinya kontrak kerja. Jika ketika membuat kontrak kerja ada ditentukan dan telah diterima uang panjar: berarti perjanjian kerja telah mengikat.¹³ Salah satu pihak tidak dapat lagi mengingkari perjanjian. Uang panjar hanya dapat dikurangi dengan jalan memeperhitungkannya dengan upah, jika hubungan kerja yang diperjanjikan lebih dari tiga bulan atau untuk suatu waktu yang

¹³ *Ibid*, hal: 246

ditentukan, tapi nyatanya hanya berjalan selama waktu tidak lebih dari tiga bulan.

Diatas sudah kita katakan bahwa upah merupakan kewajiban yang harus dibayar pihak majikan sebagai tegenprestasi. Jadi upah ialah jumlah tertentu atau objektif dapat ditentukan sebagai imbalan atas kerja tertentu yang harus dikerjakan pekerja atau pemborong.¹⁴ Pekerja atau pemborong yang telah bersedia menerima upah tertentu berarti dia telah bersedia menerima pekerjaan borongan. Yang mengakibatkan dia mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja.

Tujuan hubungan kerja baik dia yang berupa melakukan kerja, dan pemborongan kerja ialah hasil kerja. Hasil kerja inilah yang menjadi resultan persetujuan dan hubungan kerja.

Letak perbedaan antara penerima/pemborong kerja dengan persetujuan melakukan kerja, adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Pada pemborongan kerja resultan kerjalah yang diutamakan
2. Sedang pada kontrak kerja/melakukan kerja yang diutamakan adalah daya kemampuan kerja si karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang telah ditentukan.
3. Pada kontrak kerja upah tidak digantungkan pada resultan hasil kerja. Upah pada kontrak kerja disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan sesuai dengan perintah kerja yang diberikan untuk diselesaikan si pekerja, seperti supir taksi misalnya tentang perhitungan upah.

¹⁴ *Ibid*, hal: 247

¹⁵ *Ibid*, hal: 248

Tekhnologi sangat berjasa meringankan beban manusia dalam memperpendek jarak tempuh, satu diantaranya adalah tekhnologi yang mencoba menjawab kebutuhan manusia menghadapi keterbatasan waktu yaitu alat angkut yang dalam hal ini alat angkut kendaraan roda empat yaitu taksi. Demikian halnya dengan Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI solo) alat angkut kendaraan roda empat yaitu taksi yang berpusat di Mojosoong Surakarta telah membuka cakrawala baru bagi lapangan pekerjaan dibidang jasa angkutan taksi. Dimana dalam bidang jasa angkutan taksi ada pihak yang saling terkait dalam menjalankan jasa angkutan. Adapun pihak yang saling terkait tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemilik taksi dan
2. Pengemudi taksi

Dengan adanya keterkaitan antara kedua belah pihak tersebut dalam bidang jasa angkutan taksi mengakibatkan timbulnya tanggung jawab antara kedua belah pihak, pemilik taksi maupun pengemudi taksi.

Sewa-beli adalah jual-beli, setidaknya mendekati jual-beli daripada sewa-menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari keduanya. Sewa-beli mula-mula ditimbulkan ditemukan dalam praktek untuk menemukan persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan untuk membeli barangnya tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang itu sekaligus.¹⁶

¹⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian (cetakan x)*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995, hal 52

Penjual bersedia menerima harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya (sebelum harganya lunas) tidak akan dijual lagi oleh si pembeli. Dan sebagai jalan keluar lalu dikemukakan suatu macam perjanjian dimana selama harga belum dibayar lunas itu, si pembeli menjadi penyewa terlebih dahulu dari barang yang ingin membelinya.

Misalnya: “harga sewa sebenarnya adalah angsuran harga barang dan kalau dibayar tunai seumpamanya harga barang tersebut adalah Rp.100.000,- sewa-beli harga itu menjadi Rp.120.000,- yang akan diangsur tiap-tiap bulan sampai dua belas kali lunas.”¹⁷

Dan dengan dijadikannya penyewa (dengan kontrak yang juga berjudul sewa menyewa), si pembeli misalnya terancam hukuman penggelapan apabila ia sampai berani menjual barangnya. Dengan perjanjian sewa-beli yang seperti itu kedua pihak akan tertolong, artinya: “pembeli dapat mengangsur harga yang ia tidak mampu membayarnya tunai dan seketika dapat menikmati barangnya, sedangkan disebelah lain si penjual merasa aman karena barangnya tidak akan dihilangkan oleh si pembeli selama harga belum dibayar lunas.”

Penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada waktu dilakukan angsuran terakhir, penyerahan angsuran lama dapat dilakukan dengan suatu penyertaan saja karena barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli dalam kedudukannya sebagai penyewa.

¹⁷ *Ibid*, hal 52

Untuk melindungi pihak yang lemah dalam hal ini si penyewa terhadap penyalahgunaan kekuasaan si pemilik barang, antara lain dengan menetapkan bentuknya perjanjian (harus dengan perjanjian, dengan memakai judul sewa-beli dan tertulis, jadi tidak boleh berupa dua perjanjian, jual-beli dan sewa-menyewa) larangan bagi pemilik barang untuk mengambil kembali barangnya begitu saja kalau si penyewa menunggak pembayaran, apabila sudah lebih dari sepertiga harga telah diangsur sedang penuntutan kembali itu harus lewat Hakim, penegasan tentang jumlah uang pembayaran pertama sebelum perjanjian ditanda-tangani, penanda-tanganan mana harus dilakukan oleh si penyewa selalu boleh mengakhiri perjanjian sewanya tanpa sesuatu ancaman untuk memberikan ganti kerugian dan lain-lain.¹⁸

Sewa beli tidak daitur dalam KUH Perdata, tapi berkembang dan diterima dalam praktik. Karena itu hukumpun tentunya melindungi transaksi sewa-beli tersebut.¹⁹ Pada sewa-beli beralihnya hak terjadi pada seluruh cicilannya atau angsurannya lunas terbayar, dan sebelum lunas maka kedudukan pembeli hanya sebagai penyewa, dalam sewa-beli lessee otomatis (demi hukum) jadi pemilik barang diakhir masa sewa.²⁰ Dana pada sewa-beli pihak lessor yang bermaksud melakukan investasi dengan barang yang disewakan itu dengan uang sewa sebagai keuntungan, karena itu biasanya barang tersebut berasal dari milik pemberi sewa-beli sendiri.

¹⁸ *Ibid*, hal 55

¹⁹ Munir Fuady, *Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006, hal 25

²⁰ *Ibid*, hal 26

Dan dari uraian yang penulis uraikan tersebut diatas, banyak hal yang menarik untuk di selesaikan dalam praktik perjanjian kredit sewa-beli armada taksi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) selain permasalahan wanprestasi antara kedua belah pihak baik itu pengemudi taksi sekaligus sebagai pemilik dengan penyedia layanan armada taksi yakni KOSTI Solo, adapula dikarenakan problematika dari sisi pengemudi dikarenakan tidak terpenuhinya pokok kredit dan bunga yang harus dibayarkan, setoran dan mengenai hal pemutusan perjanjian oleh satu pihak atas kesalahan debitur lalai atau mengenai upah yang sesuai dengan yang dikehendaki.

Di bidang jasa angkutan kendaraan bermotor taksi ini antara pengemudi taksi dengan pemilik taksi memakai sistem perjanjian kredit sewa beli, dimana pengemudi bekerja mengemudi taksi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI solo) dan pemilik taksi sebagai pemberi pekerjaan kepada pengemudi taksi.

Perjanjian kredit merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani Bank dan Debitur, maka tidak ada pemberian kredit itu.²¹

Perjanjian Kredit merupakan ikatan dari Bank dengan Debitur yang isinya menentukan dan mengatur tentang hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit.²²

²¹ Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, hal 98

²² Ibid, hal 98

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang yang merupakan hasil permufakatan antara pembeli dan penerima pinjaman dan mengenai hubungan-hubungan hukum diantara keduanya.²³

Perjanjian kredit yang dibuat didalam bentuk akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit modal usaha dalam bentuk sewa-beli dan kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu Kreditur atau lebih dr satu Bank).²⁴

Namun dalam praktik / pelaksanaan perjanjian kredit (Sewa beli armada taksi) tersebut sering kali dijumpai bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi dengan baik atau yang disebut wanprestasi, permasalahan upah ataupun setoran serta status armada setelah terselesainya masa kredit yang mungkin menimbulkan perjanjian baru lagi sehingga menimbulkan masalah diantara para pihak yang harus diselesaikan bersama. Dalam keadaan seperti ini, maka harus diambil tindakan agar masalah tersebut segera diselesaikan dengan baik oleh para pihak dan demi kelancaran pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, sehingga perjanjian tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan isi perjanjian.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul:

²³ Edy Putra Tje'' Aman, 1985, *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Yogyakarta: Liberty, hal 31

²⁴ Sutarno, *Op. Cit*, hal 101

“PRAKTIK PERJANJIAN KREDIT SEWA BELI ARMADA TAKSI PADA KOPERASI SOPIR TRANSPORTASI SOLO (KOSTI SOLO)”

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian dan untuk menghindari terjadinya pengaburan dan perluasan masalah sebagai akibat luasnya ruang lingkup tentang objek yang akan dikaji, serta supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak meyimpang dari pokok permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai. Penulis membatasi penelitian ini mengenai Praktik Perjanjian kredit sewa beli armada taksi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo). Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar penelitian tetap fokus pada pokok permasalahan yaitu mengenai perjanjian kredit sewa beli armada taksi.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari kondisi demikian, maka penulis ingin mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian kredit sewa beli yang terjadi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo)?
2. Tindakan apa saja yang dilakukan para pihak apabila ada salah satu pihak yang dirugikan atau terjadi Wanprestasi?

3. Bagaimana status armada taksi setelah berakhirnya perjanjian kredit sewa beli tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan lebih mengetahui dan lebih memperdalam segi kehidupan disamping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik teoritis maupun segi praktis.²⁵ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian kredit sewa beli armada taksi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo).
2. Untuk mengetahui penyelesaian apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian kredit sewa beli tersebut.
3. Untuk mengetahui status armada taksi setelah perjanjian kredit sewa beli tersebut berakhir.

E. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat sehingga hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tercapai. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Pers 1986, Hal 3

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata pada umumnya.
 - b. Memberikan gambaran mengenai praktik pelaksanaan perjanjian kredit sewa beli Armada Taksi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo(KOSTI Solo)
 - c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkan kedalam praktek
2. Manfaat Praktis
- a. Mengembangkan pola pikir dan menerapkan ilmu yang diperoleh oleh penulis.
 - b. Mengetahui permasalahan yang timbul serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang berjalan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁶ Jadi suatu metode dipilih atas dasar pertimbangan mengenai keserasiannya dengan obyek, serta metode yang akan digunakan dapat berjalan dengan tujuan, sasaran dan masalah yang hendak diteliti.

1. Obyek Penelitian

²⁶ Khudzifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3

Praktik perjanjian kredit sewa beli armada taksi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo)

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI solo) di Solo/Surakarta karena lokasi tersebut merupakan yang fokus terhadap penyedia fasilitas dan sekaligus perantara terhadap masalah pembiayaan armada taksi dan terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai praktik perjanjian kredit sewa beli armada taksi, selain itu juga demi meghemat waktu dan biaya

3. Jenis penelitian

Kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.²⁷ Penelitian deskriptif disini dimaksudkan untuk dapat menggambarkan dengan baik, jelas serta data yang lengkap mengenai obyek yang akan diteliti, yaitu untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan/praktik perjanjian kredit sewa beli armada taksi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo)

4. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang akan dilakukan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang pada awalnya

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII Pers 1996, Hal 42

yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.²⁸

5. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian (KOSTI Solo) yang ada hubungannya dengan maksud penelitian

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni terdiri atas:

- (1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu prundang-undangan, Peraturan Pemerintah serta peraturan lain yang mengenai penelitian ini.
- (2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil seminar, karya dari ahli hukum, buku-buku yang mana berkaitan dari penelitian ini.
- (3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hal 53

6. Metode Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

Studi lapangan ini untuk memperoleh data primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dari subyek penelitian berupa:

1) Wawancara

Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah, guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

2) Observasi (Pengamatan)

Dengan cara mengamati secara langsung tentang pola-pola perilaku yang nyata sebagaimana adanya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia yang tidak ditemukan dalam teori.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka ini untuk memperoleh data sekunder yaitu bahan hukum dengan cara pengumpulan data melalui bahan-bahan bacaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data yang diteliti dan yang diperoleh diteliti dan diseleksi menurut kualitas dan dipergunakan untuk menggambarkan keadaan yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipilah-pilah atau dijabarkan berdasarkan pengertian-pengertian hukum

G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum akan memberikan gambaran yang tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dipahami mengenai materi pembahasan dalam penelitian hukum, sehingga akan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi dan maksud penelitian hukum secara jelas. Didalam penyusunan skripsi ini penulis membagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab akan dibagi kedalam sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas-Asas Perjanjian
3. Syarat Sahnya Perjanjian
4. Jenis-Jenis Perjanjian
5. Wanprestasi
6. Overmacht
7. Berakhirnya Perjanjian

B. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT

1. Pengertian Kredit
2. Pengertian Perjanjian Kredit
3. Bentuk Perjanjian Kredit
4. Fungsi Perjanjian Kredit
5. Perjanjian Kredit Sewa Beli

C. TINJAUAN TENTANG KOPERASI

1. Pengertian Koperasi
2. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi
3. Modal Koperasi
4. Jenis Koperasi
5. Fungsi dan Peranan Koperasi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Praktik Perjanjian kredit Sewa Beli Armada Taksi Pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo)
- B. Tindakan Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Diantara Para Pihak
- C. Status Armada Taksi Setelah Perjanjian Kredit Sewa Beli Armada Taksi berakhir

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran